



PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TABANAN**

Jalan Semila Jati II Dusun Tonja Desa Gubug Kabupaten Tabaan
TLP.(0361) 811171
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kekuatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Peanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Tahun 2025 ini mengacu pada Renstra BPBD Tahun 2021-2026, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Tahun 2025, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan telah tersusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) BPBD Kabupaten Tabanan Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja untuk lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

Kami sadar bahwa dokumen perencanaan ini belumlah sempurna, untuk itu saran yang membangun dari semua pihak baik formal maupun informal sangat kami perlukan agar dokumen perencanaan ini semakin sinergis dengan RPJPN, RPJPD, RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026 dan dokumen perencanaan lainnya untuk mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman Unggul Madani.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
SK PEMBENTUKAN TIM	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN	
BERKENANAN.....	6
2.1. Hasil Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenan.....	6
2.2. Faktor-faktor Penyebab Pencapaian target Kinerja.....	13
2.3. Implikasi yang Tibul terhadap Capaian Renstra Perangkat Daerah	14
2.4 Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran	15
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
DAERAH.....	17
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	17
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja.....	18
3.3 Program dan Kegiatan...	19
3.5 Indikator Kinerja dan Pendanaan	19
BAB IV PENUTUP	35

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD), juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dokumen tersebut merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

Derasnya arus globalisasi dan dinamika perencanaan kebencanaan di Kabupaten Tabanan maka sesuai dengan amanah Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 yang disenergiskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2021-2026. Dokumen perencanaan kinerja tersebut telah mengamanahkan untuk menjadikan Tabanan sebagai kabupaten tangguh bencana dimulai dari desa

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2004, untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan sebagai salah satu Perangkat Daerah, memiliki tanggung jawab membantu Kepala Daerah melalui tugas pokok dan fungsi dalam bidang kebencanaaan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. BPBD memiliki tugas di urusan wajib dasar bidang trantibun di sub urusan bencana.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-P) sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dalam hal ini adalah Perubahan Rencana Kerja tahun 2025. Selanjutnya, Dokumen Renja BPBD Tahun 2025 memuat Program/kegiatan tahun 2025, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun 2025.

Penyusunan Dokumen Perubahan Renja BPBD Tahun 2025 telah melalui proses penyusunan dan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya yaitu pembahasan internal BPBD

khususnya tim penyusun Dokumen Perubahan Renja BPBD Tahun 2025, hal ini guna meningkatkan perannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang akan dilaksanakan pada sisa tahun 2025 melalui pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada.

Penyusunan Dokumen Perubahan Renja BPBD Tahun 2025 ini berpedoman Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 dan Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan (sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 346 dan pasal 360). Dokumen perencanaan kinerja perubahan ini sangat penting keberadaanya dalam melaksanakan urusan wajib dasar sub urusan bencana sehingga kinerja SPM dapat ditingkatkan.

1.2. Landasan Hukum.

Adapun yang menjadi Landasan Hukum atau Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung/ Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 3
Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Sistem Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 14;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11⁴ Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 88);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
20. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
22. Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/902/02/HK/2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan dari penyusunan Dokumen Perubahan Renja BPBD Kabupaten Tabanan Tahun 2025 adalah:

- a. Merupakan suatu dokumen perubahan perencanaan kinerja dan menjadi pedoman dalam merencanakan perubahan anggaran;
- b. Merupakan suatu alat untuk mengukur kinerja instansi yang efektif, berkelanjutan;
- c. Merupakan pedoman arah dalam mencapai sasaran, keluaran dan dampak terhadap kinerja yang akan dilaksanakan.
- d. Merupakan gambaran terhadap kinerja BPBD sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 129 menyatakan “Hasil perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, disajikan dengan sistematika memuat:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKNAAN

Bab ini memuat Realisasi program/kegiatan dari target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2025, faktor-faktor penyebab pencapaian target kinerja program/kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN I TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan I.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun 2025 telah melaksanakan 2 (dua) program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja. Adapun evaluasi keuangan setalah mengalami pergeseran (efisensi) periode Januari sd Juni 2025 sebagai berikut :

a. Evaluasi Realisasi Anggaran Prorgam, kegiatan, Sub Kegiatan

N0	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran Pergeseran	Realisasi	Sisa Anggaran	% realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akuntabilitas						
1	Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Program 1: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	5.740.023.500	2.242.012.120	3.498.011.380	39.06
		Kegiatan 1: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	4.760.900	3.456.439	1.304.461	72.60
		Sub Kegiatan 1: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.644.500	2.364.929	279.571	89.43
		Sub Kegiatan 2: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.116.400	1.091.510	1.024.890	51.57
		Kegiatan 2 : Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	4.171.389.400	1.505.658.338	2.665.731.062	36.09
		Sub Kegiatan 1: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.169.158.000	1.504.719.233	2.664.438.767	36.09

		Sub Kegiatan 2: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan na n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/ Semesteran SKPD	2.231.400	939.105	1.292.295	42.09
		Kegiatan 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum BPBD	55.800.500	21.331.714	34.468.786	38.23
		Sub Kegiatan 1: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.499.400	0	2.499.400	0.00
		Sub Kegiatan 2: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.997.500	1.329.371	668.129	66.55
		Sub Kegiatan 3: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	27.000.000	8.812.056	18.187.944	32.64
		Sub Kegiatan 4: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3.880.700	1.093.512	2.787.188	28.18
		Sub Kegiatan 5: Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8.870.000	7.591.307	1.278.693	85.58
		Sub Kegiatan 6: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.868.000	0	6.868.000	0.00
		Sub Kegiatan 7: Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.684.900	2.505.468	2.179.432	53.48
		Kegiatan 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD pada BPBD	258.323.800	122.400.000	135.923.800	47.38

		Pemerintah Daerah					
		Sub Kegiatan 1: Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	258.323.800	122.400.000	135.923.800	47.38
		Kegiatan 5: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	1.156.394.600	549.572.402	606.822.198	47.52
		Sub Kegiatan 1: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	2.000.000	2.000.000	0.00	100.00
		Sub Kegiatan 2: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	31.997.000	16.346.458	15.650.542	51.09
		Sub Kegiatan 3: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1.122.397.600	531.225.944	591.171.656	47.33
		Kegiatan 6: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya BMD yang menunjang urusan kantor	93.354.300	39.593.227	53.761.073	42.41
		Sub Kegiatan 1: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	76.757.000	24.051.840	52.705.160	31.34
		Sub Kegiatan 2: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	16.597.300	15.541.387	1.055.913	93.64
II	Bencana						

1	Sasaran 1. Penuruan risiko bencana	Program 1. Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan Prabencana, Tanggap darurat dan Pasca Bencana	556.416.200	127.277.477	429.138.723	22.87
		Kegiatan 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	Jumlah daerah yang meningkatkan kapasitas sistem informasi kebencanaan	20.000.000	18.742.471	1.257.529	93.71
		Sub kegiatan 1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di Kawasan tempat tinggalnya	20.000.000	18.742.471	1.257.529	93.71
		Kegiatan 2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase wilayah yg memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	167.203.800	18.742.471	148.461.329	11.21
		Sub kegiatan 1 Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	19.478.000	15.805.641	3.672.359	81.15
		Sub kegiatan 2 Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	23.731.300	15.805.641	7.925.659	66.60
		Sub kegiatan 3 Penyusunan Rencana Kontijensi	Terpenuhinya penyelesaian Dokumen sampai dinyatakan sah/legal	100.000.000	0	100.000.000	0.00
		Sub kegiatan 4 Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	23.994.500	0	23.994.500	0.00

	Kegiatan 3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	349.212.400	81.694.855	267.517.545	23.39
	Sub kegiatan 1 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase respon penanganan darurat bencana	349.212.400	81.694.855	267.517.545	23.39
	Kegiatan 4 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terdata	20.000.000	11.034.510	8.965.490	55.17
	Sub kegiatan 1 Penanganan pasca bencana kabupaten/ kota	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pascabencana dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	20.000.000	11.034.510	8.965.490	55.17
jumlah			6.296.439.700	2.369.289.597	3.927.140.103	37.63

Sumber : Laporan Realisasi Renja sd Januarisid Juni 2025

Dari Laporan Realisasi Anggaran pada 2 (dua) program dalam 10 (sepuluh) kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan pada Tahun 2025 diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan per 30 Juni 2025 sebesar 37,63% dan sisa pagu 62,37%.

b. Evaluasi Kinerja Utama

BPBD telah melakukan evaluasi capaian kinerja yang diperjanjikan di IKU dengan hasil seperti berikut ini.

- Semua usulan atau permohonan masyarakat akan kebencanaan telah dapat dilayani/ diselesaikan secara administarsi oleh manajemen BPBD dan secara teknis oleh TRC (Tim Reaksi Cepat) BPBD dengan dukungan 35 orang personal yang bertugas dua sip yang terbagi 4 (empat) kelompok sehingga 24 jam 7 hari kerja personal TRC siaga.
- Akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang dinilai oleh Inseptorat melalui

- dokumen LKjIP sebagai bagian dari dokumen SAKIP sudah memperoleh nilai 62,25 atau B yang dikeluarkan nilainya tahun 2021 dan dengan nilai 70,41 atau BB yang dikeluarkan nilainya di tahun 2023. Hasil LHE 2024 atas SAKIP 2023 telah dikeluarkan LHE oleh Inspektorat dengan nilai BB (71,41.) dan tahun 2025 dengan nilai 72,85 atau BB. Data berikut ini

No	Sasaran	Indikator	Realisasi / triwulan	
			I	II
1	Pengurangan Risiko Bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	100%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai LKjIP	72,85	72,85
	Rata-rata (%)		86,43	86,43

Sumber : Data BPBD, 2025

c. Evaluasi Kinerja Program

Pencapaian indikator kinerja dua program sudah 100% Hasil analisis sebagai berikut :

- persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD dengan realisasi keuangan 39,06% dan fisik layanan administrasi dan kelancaran pelayanan publik 50,0% .
- prosentase penanganan prabencana, tanggap bencana, dan pasca bencana dengan realisasi anggaran 22,87% dan fisik layanan sudah terealisasi 100% dengan waktu tanggap bencana 24 jam 7 hari kerja. Hasil pengukuran kinerja seperti berikut ini

No	Program	Indikator	Realisasi sd
			Triwulan II
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	50%
2	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana	100%
	Rata-rata (%)		75,0%

Sumber : Data BPBD, 2025

d. Evaluasi Kinerja Kegiatan

BPBD telah melakukan evaluasi capaian kinerja yang diperjanjikan di IKK dengan rata-rata kinerja 67,43%. Adapun kinerjanya seperti

berikut ini.

No	Kegiatan	Indikator	Kinerja sd TW 2	
			Target	Reaisasi
1	Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	10 kec	10 kec
2	Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase wilayah yang memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	100%	30%
3	Kegiatan pelayaan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Prosentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana	100%	100%
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terdata	1 dok	1 dok
5	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	3 dok	2 dok
6	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	100%	37,63%
7	Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum BPBD	100%	50%
8	Pengadaan BMD penunjang urusan PD	Persentase pengadaan barang BMD yang layak operasional	100%	100%
9	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	100%	50%
10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya BMD yang menunjang urusan kantor	100%	40%
Rata-rata (%)			100%	67,43

Sumber : Data BPBD, 2025

2.2 Faktor-Faktor Penyebab Pencapaian target Kinerja Program dan Kegiatan

Dalam penyelenggaraan kinerja urusan wajib dasar sub urusan bencana terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target Kinerja program/kegiatan, antara lain:

- a) Pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota ada enam kegiatan yang mendapatkan anggaran dimana tahun 2025 kegiatan pengadaan BMD sudah didukung oleh anggaran karena BPBD per tanggal 5 Pebruari 2025 menempati kantor baru sehingga diperlukan sarana kelengkaan pelayanan dan kekurangan belanja listrik.

- b) Pada beberapa kegiatan ataupun sub kegiatan di dua program terjadi keterlambatan proses admisnistrasi keuangan sehingga ini berpengaruh terhadap capaian target di bulan ataupun triwulan berjalan, hal ini disebabkan adanya PPTK melaksanakan tugas belum optimal mengacu pada aliran kas yang telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan revisi anggaran di pergeseran.
- c) Adanya perubahan aturan keuangan yang menyebabkan terjadinya efisensi angagran sehingga terjadi pengurangan pagu angagran induk dan sudah ditindaklanjuti di RKA pergeseran dan terbit DPA pergeseran.
- d) Kekurangan anggaran di sub kegiatan gaji dan tunjangan ASN di rekening tunjangan penghasilan berdasarkan beban kerja dan PPh Pasal 21 dan sudah diusulkan ke TAPD untuk penambahan anggaran di perubahan APBD TA 2025 .

2.3 Implikasi yang Timbul terhadap Capaian Program Renstra PBD

Dari hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan penyerapan anggaran sampai dengan triwulan I, dapat diketahui bahwa capaian kinerja BPBD Kabupaten Tabanan sudah sesuai dengan target kinerja atau masuk dalam kategori baik, namun penyerapan anggaran BPBD Kabupaten Tabanan baru mencapai 17,58% atau di bawah target yang dikarenakan revisi DPA dan perubahan aturan keuangan yang berimplikasi pada kekurangan anggaran tunjangan penghasilan berdasarkan beban kerja dan PPh Pasal 21. Oleh karena itu, implikasi yang timbul terhadap capaian program renstra Perangkat Daerah tercapainya target kinerja pada triwulan I dan selalu melakukan evaluasi dan perbaikan untuk dapat mencapai target capaian pada triwulan berikutnya.

2.4 Kebijakan/ Tindakan Perencanaan dan Penganggaran

Menganalisis capaian kinerja, hambatan, dan implikasi atas kinerja sampai Triwulan I 2025 maka arah kebijakan atau tindakan yang diambil oleh BPBD Kabupaten Tabanan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab

- Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Sememsta Berencana di tujuan 1, sasaran 1 dalam pemenuhan hak dasar warga maka diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas, kondisi tersebut sangat erat dengan bencana yang tidak dapat dihindari namun dapat dimitigasi. Secara kelembagaan dan struktur organisasi di BPBD Kabupaten Tabanan sesuai dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 9 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 105 tahun 2022 ditinjau dari cakupan bidang tugas dan fungsinya telah mencapai bentuk yang optimal yang memenuhi kriteria organisasi kebencanaan yang disyaratkan.
- Keberadaan Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, dan Bidang Rehabiliatsi dan Rekontruksi telah disesuaikan dengan kebutuhan dan organisasi yang mendukung fungsi-fungsi urusan wajib dasar sub urusan bencana.
- Dalam mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal Kabupaten Tabanan masih terdapat faktor penghambat dan faktor pendorong bagi BPBD Kabupaten Tabanan. Faktor penghambat dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis BPBD antara lain:
 1. Kurangnya aparatur kebencanaan yang menangani teknis pelayanan kebencanaan yang selama ini hanya didukung oleh fungsional umum : Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ada 1 pelaksana, Bidang Kedaruratan dan Logistik 0 pelaksana, Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi 2 pelaksana dan 3 orang PNS di pelayanan administrasi.
 2. Belum terisinya formasi jaatan fungsional Analis Bencana, JF Perencana, dan JF Pranata humas sehingga belum ada PNS yang dengan cepat menyajikan kaji cepat analisis kebencanaan, pelaporan kebencanaan dengan optimal, kajia perencanaan dan humas.
 3. Terbatasnya kompetensi manajerial dan kompetensi teknis

kebencanaaan sehingga profesionalitas SDM dalam melakukan tugas pokok dan fungsi belum dapat optimal

4. Kurang optimalnya koordinasi antara perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di urusan wajib dasar yang diampu oleh 6 (enam) perangkat daerah, dan kurang optimalnya dukungan perangkat daerah terkait dalam pemenuhan indeks ketahanan daerah (IKD) dan indeks risiko bencana (IRB) yang diamanahkan dalam RPJMD Semesta Berencana.
5. Masih rendah akurasi data kebencanaan karena kompleksitas data kebencanaan yang dibutuhkan untuk analisis pembangunan.
6. Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelayanan administrasi dan pelayanan publik kebencanaan dan penanggulangan bencana yang masih lemah;
7. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung mitigasi dan penanggulangan bencana yang sangat minim menyukarkan *respon time* pelayanan kebencanaan.
8. Belum adanya gudang logistik yang sesuai jukis dalam menyimpan logistik yang rawan kontaminasi patogen.
9. Belum adanya ruang Pusdalops sebagai kendali informasi dan operasi kebencanaan.
10. Belum definitifnya tambahan pegawai dari PPPK untuk mendukung kinerja layanan dan penganggarannya.

Sedangkan faktor pendorong BPBD untuk mencapai tujuan, sasaran dan target untuk 5 tahun mendatang antara lain:

1. Tersedianya anggaran minimal dalam pelayanan administrasi dan pelayanan publik kebencanaan.
2. Tersedianya perangkat teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) yang mendukung peningkatan kinerja.
3. Adanya upaya untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas data/informasi untuk keperluan kajian dan identifikasi penanggulangan bencana.
4. Adanya usaha untuk menemukan model dan pendekatan dalam koordinasi, monitoring dan evaluasi penanggulangan bencana

lintas sektor dan lintas SKPD yang lebih efektif dan efisien.

5. Tersedianya kantor baru di Jalan Semila Jati II Desa Gubug Kecamatan Tabanan sebagai kantor layanan kebencanaan yang berdampingan dengan kantor DLH dan Kantor Satpol PP yang mengembang amanah pelayanan masyarakat.
6. Usaha untuk melakukan respon time pelayanan didukung oleh moto “pantang pulang sebelum tuntas” sebagai penyemangat pelayanan kemanusiaan yang sudah berkolaborasi dengan TNI, Polri, PMI, FRB, Relawan, RAPI, dan organisasi kemanusian lainnya untuk memenuhi amanah Misi pertama dan sasaran pertama RPJMD Semesta Berencana dalam pelayanan dasar warga.
7. Adanya komitmen pimpinan dan pegawai dalam melaksanakan standar pelayanan sesuai malumat layanan.
8. Adanya upaya-upaya ide kreatif dan inovatif dalam meningkatkan kinerja layanan yang saat ini sedang dikembangkan seperti SENTANA (Seniman Tangguh Bencana), dan TTM Desa (Tabanan Tangguh Mulai dari Desa).

BAB III

RECANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list ke working plan*. Satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif, perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, teknokratik, partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan- kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan - kegiatan yang berdampak rendah pada ketahanan daerah selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi BPBD yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam perencanaan penanggulangan bencana, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional di bawah koordinansi Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD di seluruh kabupaten/kota seluruh Indonesia dalam pra bencana, tanggap pencana, dan pasca bencana terus berkoordinasi

sehingga program kerja sinergis dalam penanggulangan bencana sesuai Rencana Induk Penanggulangan Bencana Nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kerja BPBD

Sedangkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Tabanan maka BPBD telah melakuka sinkronisasi perencanaan.

Visi : Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)”;

MISI : misi merupakan penjabaran dari visi, yaitu serangkaian cara atau Langkah-langkah yang harus dilakukan guna mewujudkan visi. Sebagai penjabaran visi pembangunan Tabanan 2021-2026, yang berorintasi pada terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui jalan Tri Sakti (Berdaulat dalam Bidang Politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi dan Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan)atas: Pangan, Sandang, dan Papan; Pendidikan dan Kesehatan; jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan; Adat, Agama, Tradisi, seni dan Budaya; dan Pariwisata, maka Misi yang diemban oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati adalah:

1. Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Aman dan Nyaman dalam Perikehidupan (Aman)
2. Membangun Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemampuan dan Berdaya Saing Tinggi di Segala Bidang Kehidupan (Unggul)
3. Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemandirian Secara Sosial-Ekonomi di Berbagai Bidang yang Berkepribadian dalam Kebudayaan (MADANI)

Tujuan :

Tujuan Rencana Kenja Perangkat Daerah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tujuan yang hendak dicapai pada Tahun 2024 adalah : Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi bencana.

Sasaran :

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga harus bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh BPBD dengan Sasaran Pengurangan risiko bencana melalui Program Penanggulangan Bencana dengan 4 (empat) Kegiatan

meliputi;

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota.
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Bencana

3.3 Prorgam dan Kegiatan

Dalam rangka pelaksanaannya maka program, kegiatan dan pendanaan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Program Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Tabanan Tahun 2025 :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini direncanakan akan dapat mendukung perencanaan kinerja yang akuntabel dan mendorong kelancaran administrasi keuangan dan pelayanan publik.
2. Program Penanggulangan Bencana. Program ini direncanakan akan mendukung pencapaian kinerja SPM dan indikator kinerja BPBD dalam pelayanan pra bencana, tanggap bencana, dan pasca bencana, sehingga semua usulan dan pengaduan masyarakat dapat terlayani dalam mendukung misi pertama RPJMD SB.

Sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Tabanan Tahun 2025 meliputi :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evakuasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Umm Perangkat Daerah
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan Pemerintah Daerah
7. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
8. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
9. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
10. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Bencana

3.4 Indiktor Kinerja dan Pendanaan

Sesuai amanah peraturan kinerja, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah merumuskan sinergisitas program, kegiatan, sub kegiatan dengan indikator dan targetnya dapat terukur secara berkala. Dukungan anggaran di masing-masing sub kegiatan sudah

diselaraskan dengan hasil musrenbang, Forum OPD, dan kajian teknokratik.

a. Indikator Kinerja SPM dan Indikator Kinerja Daerah pada RPJMD SB

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD.

Indikator Kinerja Daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat kami sampaikan pada tabel dibawah ini.

Tabel Indikator Kinerja pada RPJMD SB

Visi : Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan Era Baru : Aman Unggul Madani								
Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Tabanan yang Aman dalam Perikehidupan (Aman)								
Tujuan, Sasaran	Indikator	Awal RPJMD	Target Capaian					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan 1. Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan	Persentase capaian SDG's terhadap target rencana aksi daerah	N.A	70	80	85	90	90	90
Sasaran 1 Terjaminnya pemenuhan hak pelayanan dasar warga	Rata-rata persentase Capaian SPM 6 Pelayanan Dasar	100	100	100	100	100	100	100
Bidang urusan	IKD	Awal Renstra	Target Capaian					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.6 Trantibun limnas	Tingkat waktu tanggap layanan kebencanaan (respon time rate)	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : RPJMD SB Tahun 2021-2026

c. Indikator Kinerja Tujuan

Penjabaran atas visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Semesta Berencana yang menjadi urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah dirumsuskan tujuan jangka menengah untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan organisasi. Adapun indikator tujuan disajikan seperti berikut ini.

Tabel Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan	IKT	Awal Rentra	Target Capaian						Sat
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam mengahdapi bencana	Menurunkan indeks resiko bencana	159,83	156,63	153,50	150,43	147,42	144,47	141,58	%
Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan OPD	Hasil evaluasi penialian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	75	80	85	90	90	95	95	%

d. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah pada BPBD Kabupaten Tabanan ada 2 (dua) seperti berikut ini.

Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tujuan	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			Tahun 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam mengahdapi bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan OPD	Nilai LKjIP	A	A	A	A	A	A	A	A

e. Indikator Kinerja Program dan Kegitan

Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah disinkronisasikan dengan RKPD Kabupaten Tabanan dapat kami tuangkan dalam Tabel IV.1 dibawah ini.

Tabel III.1a
RUMUSAN RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
KABUPATEN TABANAN

a. Anggaran Induk

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
		Tahun 2025	
		Target	Dalam Jumlah (Rp).
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	100%	5.749.198.800
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	3 Dokumen	5.499.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Outcome: Nilai LKJIP Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.999.000
Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Outcome: Nilai LKJIP Output: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.500.000
Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	100%	4.171.657.400
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Outcome: Nilai LKJIP Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	4.169.158.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 laporan	2.499.400
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum BPBD	100%	63.969.700
Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah paket Komponen instalasi listrik tersedia	1 paket	2.499.400
Penyediaan peralatan rumah tangga	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah paket peralatan rumah tangga yg tersedia	1 Paket	1.997.500
Penyediaan bahan logistic kantor	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	27.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.500.000
Penyediaan Bahan/material	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 paket	10.000.000
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	12.974.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4.998.800
Pengadaan Barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD pada BPBD	100%	258.323.800

Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit	258.323.800
Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Outcome: Nilai LKjIP Output: Persentase terpenuhinya jasa surat menyurat	100%	1.156.394.600
Penyediaan Jasa Surat menyurat	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Laporan	2.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	31.997.000
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.122.397.600
Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpeliharanya BMD yang menunjang urusan kantor	100 %	93.354.300
Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	76.757.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 unit	16.597.300
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan Prabencana, Tanggap darurat dan Pasca Bencana	100%	559.212.400
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	10 Kecamatan	20.000.000

Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana)	Outcome: Indeks risiko bencana Output: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	60 Orang	20.000.000
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Percentase wilayah yg memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	100%	170.000.000
Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	Outcome : Indeks risiko bencana Output : Jumlah warga negara yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	50 orang	25.000.000
Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Outcome: Indeks risiko bencana Output: Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	2 kawasan	25.000.000
Penyusunan Rencana Kontijensi	Outcome: Indeks risiko bencana Output: Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 dok	100.000.000
Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Outcome: Indeks risiko bencana Output: Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 orang	20.000.000
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Percentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	349.212.400
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Outcome: Indeks risiko bencana Output: Persentase respon penanganan darurat bencana	100%	349.212.400
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terdata	1 dokumen	20.000.000

Koordinasi penanganan pasca bencana kabupaten/ kota	Outcome : Indeks risiko bencana Output : Jumlah dokumen penanganan pasca bencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pascabencana dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	1 dokumen	20.000.000
	Jumlah Total:		6.308.411.200

Tabel III.1b

RUMUSAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
KABUPATEN TABANAN

b. Anggaran Perubahan

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		
		Induk		Perubahan
		Target	Dalam Jumlah (Rp).	Dalam Jumlah (Rp).
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	100%	5.749.198.800	5.923.701.701
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	3 Dokumen	5.499.000	4.760.900
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.999.000	2.644.500

Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.500.000	2.116.400
Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	100%	4.171.657.400	4.304.389.400
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	4.169.158.000	4.302.158.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	2.499.400	2.231.400
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum BPBD	100%	63.969.700	55.800.500
Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah paket Komponen instalasi listrik tersedia	1 paket	2.499.400	2.499.400
Penyediaan peralatan rumah tangga	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah paket peralatan rumah tangga yg tersedia	1 Paket	1.997.500	1.997.500
Penyediaan bahan logistic kantor	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	27.000.000	27.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.500.000	3.880.700

Penyediaan Bahan/material	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 paket	10.000.000	8.870.000
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	12.974.000	6.868.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4.998.800	4.684.900
Pengadaan Barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD pada BPBD	100%	258.323.800	258.323.800
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit	258.323.800	258.323.800
Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Outcome: Nilai LKjIP Output: Persentase terpenuhinya jasa surat menyurat	100%	1.156.394.600	1.166.394.600
Penyediaan Jasa Surat menyurat	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Laporan	2.000.000	2.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	31.997.000	41.997.000
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.122.397.600	1.122.397.600
Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpeliharanya BMD yang menunjang urusan kantor	100 %	93.354.300	134.032.700

Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	76.757.000	92.755.400
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 unit	16.597.300	41.277.300
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penangan Prabencana, Tanggap darurat dan Pasca Bencana	100%	559.212.400	562.221.200
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	10 Kecamatan	20.000.000	20.000.000
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana)	Outcome: Indeks risiko bencana Output: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	60 Orang	20.000.000	20.000.000
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase wilayah yg memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	100%	170.000.000	167.203.800
Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	Outcome : Indeks risiko bencana Output : Jumlah warga negara yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	50 orang	25.000.000	23.994.500
Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Outcome: Indeks risiko bencana Output: Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan	2 kawasan	25.000.000	23.731.300

	Kesiapsiagaan Bencana			
Penyusunan Rencana Kontijensi	Outcome: Indeks risiko bencana Output: Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi	1 dok	100.000.000	100.000.000
Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Outcome: Indeks risiko bencana Output: Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 orang	20.000.000	19.476.000
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	349.212.400	349.212.400
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Outcome: Indeks risiko bencana Output: Persentase respon penanganan darurat bencana	100%	349.212.400	349.212.400
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terdata	1 dokumen	20.000.000	25.805.000
Koordinasi penanganan pascabencana kecamatan/kota	Jumlah peenyelesaian kegiatan pascabencana di semua sector berdasarkan RP3K kabupaten / kota yang dilegalkan	1 dokumen	20.000.000	25.805.000
	Jumlah Total:		6.308.411.200	6.485.923.100

Sumber : BPBD, 2025

f. Pengukuran Kinerja

Untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan kegiatan dan sub kegiatan prioritas diatas maka disusun formula pengukuran kinerja seperti tabel berikut ini.

a. Program

Program	Indikator Kinerja	Formula / dasar pengukuran	Target
Penanggulangan bencana	Presentase penanganan Prabencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana	Jumlah Bencana yang tertangani dibagi Jumlah bencana yang terjadi dikali 100	100%
Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	Jumlah administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD dibagi jumlah administrasi perkantoran dikali 100	100%

b. Kegiatan

Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Kinerja
Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	Jumlah kecamatan yang mendapatkan edukasi dan informasi rawan bencana	10 kecamatan
Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase wilayah yang memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	Realisasi wilayah kecamatan yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi target perencanaan dikalikan 100	100%
Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Prosentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana	Realisasi wilayah kecamatan yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi target perencanaan dikalikan 100	100%
Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Prosentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Realisasi sistem dasar pasca bencana dibagi dengan permohonan masyarakat terdampak benama dikalikan 100%	100%
Perencanaan, Penganggaran dan	Jumlah Dokumen perencanaan,	Jumlah jenis dokumen perencanaan, pengukuran,	3 dok

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	evaluasi, dan pelaporan kinerja dihasilkan setahun	
Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	Realisasi adminsitasi keuangan dibagi target perencanaan administrasi keuangan dikalikan 100	100%
Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum BPBD	Realisasi adminsitasi umum dibagi target perencanaan administrasi umum dikalikan 100	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD pada BPBD	Realisasi penyediaan BMD dibandingkan dengan target penagdaan BMD dikalikan 100%	100%
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	Realisasi penyediaan jasa penunjang urusan kantor dibagi target perencanaan penyediaan jasa penunjnag dikalikan 100	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya BMD yang menunjang urusan kantor	Realisasi pemenuhan BMD yang layak oeprasional dibagi target perencanaan pemenuhan BMD dikalikan 100	100%

c. Sub Kegiatan

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Kiinerja
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan kinerja jangka pendek BPBD yang dihasilkan	2 dokumen
Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKjIP dihasilkan	1 dokumen
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	Jumlah gaji, tunjangan, TPP ASN yang dibayarkan	34 Orang/bulan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan BMD yang tersedia	2 laporan

	Semesteran SKPD		
Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik untuk penerangan kantor tersedia	1 paket
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga kantor yg tersedia	1 Paket
Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik penunjang keagamaan yang disediakan	1 Paket
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan mendukung kelancaran administrasi	2 Paket
Penyediaan Bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah paket bahan penunjang administrasi yang disediakan	3 paket
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	2 Laporan
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen administrasi arsip PD yang mendukung tusi BPBD	4 dok
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Jumlah unit peralatan computer dan printer tersedia	8 unit
Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah laporan surat menyurat mendukung administrasi	150 Laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik mendukung kelancaran pelayanan	3 laporan
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang diterima tenaga non ASN	12 Laporan
Pengadaan peralatan dan mesin	Jumlah barang milik daerah yang tersedia mendukung pelayanan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit

Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara mendukung operasional penanggulangan bencana	12 unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin terpelihara baik dalam mendukung pelayanan	16 unit
Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah masyarakat rawan bencana yang terlatih	50 orang
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana)	Jumlah orang yg mendapatkan sosialisasi kebencanaan	Jumlah orang yang berada di kawasan rawan bencana mendapatkan sosialisasi kebencanaan	60 Orang
Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang mendapat pemahaman kebencanaan	Jumlah kawasan yang mendapat pemahaman kebencanaan menuju desa mandiri tangguh bencana	2 Desa
Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi	Jumlah dokumen rencana kontijensi gempa diahsilkan	1 dokumen
Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yg mengikuti gladi kesiapsiagaan	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan sehingga siapsiaga bencana	100 orang
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Percentase erlaksananya tim respon cepat penanganan darurat bencana	Percentase terlaksananya tim respon cepat dalam penanganan kejadian darurat bencana	100 %
Koordinasi penanganan pascabencana kabupaten/kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sector berdasarkan RP3K kabupaten/kota yang dilegalkan	Jumlah SK jituspsna yang diterbitkan membantu masayarakat terdampak pascabencana	1 dokumen SK

BAB IV

PENUTUP

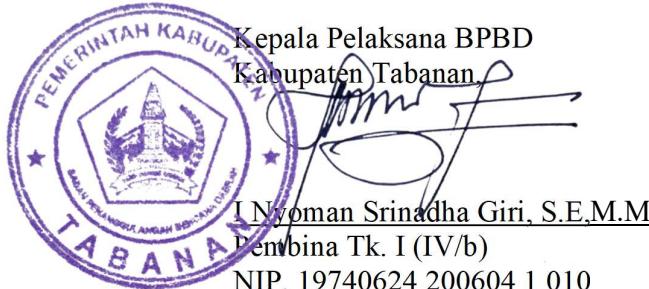
Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggangan Bencana Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 dan Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan (sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 346 dan pasal 360).

Perubahan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Tabanan pada Tahun Anggaran 2025 terjadi pada perubahan anggaran dari Rp. 6.308.411.200,00 menjadi sebesar Rp. 6.485.923.100,00 atau naik 2,81%. Perubahan anggaran BPBD terjadi di belanja pegawai dan belanja barang/jasa yang dipergunakan untuk menunjang pencapaian tujuan dan sasaran BPBD pada Tahun Anggaran 2025 sebagaimana yang tertuang Renstra BPBD Tahun 2021-2026

Sebagai tindaklanjut atas ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja (Renja) BPBD Tahun Anggaran 2025 ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPBD Tahun Anggaran 2025.
2. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Aksi Kinerja pada Tahun Anggaran 2025.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025

Demikian Perubahan Rencana Kerja ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam penanggulangan bencana.



Lampiran
Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025

a. Program

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
Penanggulangan bencana	Meningkatnya penanganan prabencana, tanggap bencana, dan pasca bencana	Presentase penanganan Prabencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana	100%
Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Meningkatnya pelayanan administrasi dan pelayanan publik perangkat daerah	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	100%

b. Kegiatan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Meningkatnya pengetahuan mitigasi bencana masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	10 kecamatan
Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Meningkatnya kapasitas masyarakat di wilayah rawan bencana	Percentase wilayah yang memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	100%
Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Meningkatnya layanan penanganan bencana	Prosentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana	100%
Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kajian cepat pasca bencana	Prosentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana	100%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	3 dok
Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan yang	Percentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	100%

	akuntabel		
Administrasi umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum BPBD	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah	Meningkatnya ketersediaan BMD yang membantu peningkatan kinerja perangkatdaerah	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD pada BPBD	100%
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Meningkatnya pelayanan publik perangkat daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya BMD yang layak operasional mendukung pelayanan kebencanaan	Persentase terpenuhinya BMD yang menunjang urusan kantor	100%

c. Sub Kegiatan

Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kiinerja
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkanya kualitas perenanaan kinerja BPBD	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun	2 dokumen
Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Meningkatnya ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan kinerja BPBD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya pelayanan gaji dan tunjangan meunjang kienra pegawai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	34 Orang/ bulan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD	Meningkatnya kualitas laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semest eran SKPD	2 laporan
Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Menngkatnya penyediaan komponen instalai listrik untuk penerangan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
Penyediaan peralatan rumah tangga	Meningkatnya ketersediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket

	mendukung pelayanan		
Penyediaan bahan logistik kantor	Meningkatnya ketersediaan logistik untuk operasional kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya keetrseidana barang cetakan dan foto copy dokumen mendukung layanan administrasi	tersedianya barang cetak dan penggandaan	2 Paket
Penyediaan Bahan/material	Meningkatnya ketersediaan bahan material mendukung operasional kinerja	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 paket
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Meningkatnya sinkronisasi progam prioritas pusat dan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Meningkatnya tata kelola arsip perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 dok
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Meningkatnya sarana kerja operasional mendukung pelayanan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	8 unit
Penyediaan Jasa Surat menyurat	Meningkatnya ktersediaan materai mendukung layanan adminisrasni	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	150 Laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya ketersediaan listrik, air, dan telepon menunjang pelayanan publik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Meningkatnya kierja aparatur non ASN dalam pelayanan administarsi dan publik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang disediakan	12 Laporan
Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Meningkatnya dukungan sarana operasional dalam mobilitas kienrja pelayanan publik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit
Pemeliharaan	Meningkatnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	16 unit

Peralatan dan Mesin lainnya	peralatan kerja yang layak operasional	Lainnya yang dipelihara	
Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	Meningkatnya warga negara di daerah rawan bencana yang memahami mitigasi bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	50 orang
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana)	Meningkatnya upaya mitigasi bencana secara tatap muka dan media elektronik / medsos di daerah rawan bencana	Jumlah orang yg mendapatkan sosialisasi kebencanaan	60 Orang
Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Meningkatnya ketangguhan desa di daerah rawan bencana	Jumlah kawasan yang mendapat pemahaman kebencanaan	2 Desa
Penyusunan rencana kontijensi	Meningkatnya kebersediaan dokumen renkon untuk pedoman mitigasi bencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi	1 dokumen
Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan warga negara mengahdapi bencana	Jumlah warga negara yg mengikuti gladi kesiapsiagaan	100 orang
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya respon time layanan tangga pbencana	Persentase erlaksananya tim respon cepat penanganan darurat bencana	100 %
Koordinasi penanganan pascabencana kebupaten/kota	Meningkatnya penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sector berdasarkan RP3K kabupaten / kota yang dilegalkan	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sector berdasarkan RP3K kabupaten / kota yang dilegalkan	1 Dokumen

